



Akses Sekolah Swasta Gratis DKI Bertambah

Kuota sekolah gratis di Jakarta bertambah seiring penambahan alokasi anggaran daerah untuk sekolah swasta gratis pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS — Akses sekolah swasta gratis di Jakarta akan bertambah hingga 1.000 sekolah pada tahun 2025. Penambahan ini untuk mengakomodasi siswa tidak mampu sehingga tidak ada lagi cerita putus sekolah dan tidak bisa ikut ujian atau ijazah ditahan karena tunggakan.

Kesepakatan bertambahnya sekolah swasta gratis merupakan salah satu hasil pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024 antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada pekan lalu. Sebagai tindak lanjut, akan berlangsung penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, setidaknya 1.000 sekolah swasta akan masuk program sekolah gratis pada 2025. Sekolah swasta ini merupakan penerima dana bantuan operasional sekolah atau dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

"Realisasi sekolah swasta gratis ini mencapai 1.000 sekolah dan akan dimulai tahun 2025. Selama ini anggarannya sudah ada, tinggal *political will* atau kemauan dari pemerintah menjalankan amanat konstitusi," kata Jhonny, Senin (12/8/2024), di Jakarta.

Menurut dia, sekolah swasta gratis wujud kebijakan, bukan jargon atau hanya di awang-awang. Selain itu, sekolah gratis bukan prestasi pemangku kepentingan. Sekolah gratis yang baru terwujud menunjukkan lalainya pemangku kepentingan dalam membuat skala prioritas selama ini. "Jadi, ke depan tak ada lagi ijazah ditahan karena tunggakan, siswa putus sekolah," ujarnya.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tahun 2023 disebutkan, ang-

ka harapan lama sekolah 13,33 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,45 tahun. Angka harapan lama sekolah berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang diselesaikan dalam pendidikan formal.

Jhonny mengatakan, selama ini pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan minim memperhatikan pendidikan yang diamanatkan konstitusi. Padahal, pendidikan tak terpisahkan dari tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pemerintah juga menyebut wajib belajar 12 tahun. Ini bukan hanya kemauan masyarakat yang didorong, melainkan juga peran pemerintah untuk mewujudkannya dengan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Selama ini, kan, banyak orang mampu yang menikmati sekolah gratis," ucapnya.

Merujuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2023, terdapat 8.868 sekolah, terdiri dari 2.007 sekolah negeri dan 6.861 sekolah swasta. Namun, tidak semua siswa, khususnya tidak mampu, bisa masuk sekolah negeri atau sebagian swasta yang gratis karena keterbatasan daya tampung.

Saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta 2024, diketahui SMP negeri berdaya tampung 71.093 peserta didik. Dengan perkiraan calon siswa 151.164 orang, SMP negeri hanya bisa menampung 47,03 persen dari jumlah tersebut.

Kondisi serupa terjadi di jenjang SMA dengan kuota bagi 29.559 peserta didik dan SMK 20.130 peserta didik. Dengan perkiraan calon siswa SMA/SMK mencapai 139.841 orang, daya tampungnya ha-

nya 35,53 persen dari jumlah calon siswa yang mendaftar.

Sementara jumlah calon siswa yang bisa diterima di SD negeri lebih banyak daripada SMP dan SMA. Hal itu karena jumlah SD lebih banyak daripada SMP dan SMA.

Atas situasi ini, dibuka PPDB Bersama bagi siswa tak mampu oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuannya, memperluas daya tampung jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan melibatkan 406 SMP dan SMA/SMK swasta gratis dengan daya tampung 8.426 siswa.

Tahun 2024 ada 406 SMP dan SMA/SMK swasta yang masuk PPDB bersama. Untuk tahun 2025 diharapkan ada 1.000 sekolah swasta yang masuk ke PPDB bersama sehingga siswa yang kurang mampu bisa bersekolah. Sementara ada 415 sekolah swasta yang sudah mandiri atau tidak menerima BOS tidak bisa mengikuti PPDB bersama.

Hak anak

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, usai penyuluhan penyalahgunaan narkoba kepada pelajar se-Jakarta di Jakarta Selatan, pekan lalu, menyampaikan, penambahan sekolah swasta gratis masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah tuntas, berlanjut dengan sosialisasi ke pemangku kepentingan lainnya. Sekolah swasta gratis itu di luar 415 sekolah yang sudah mandiri atau tidak menerima dana BOS.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, menyebutkan dua hal. Pertama, sedang dilakukan kajian mencakup kebutuhan anggaran, dasar hukum pelaksanaan, dan mekanisme penatausahaan anggaran serta pertanggungjawaban sekolah gratis. Kedua, terkait dengan percepatan implementasi se-

kolah gratis, pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8/2006 tentang Sistem Pendidikan perlu dipercepat sehingga sekolah gratis dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan portal data Kemendikbudristek tentang jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat tiap provinsi, per 30 November 2023 terdapat 273 siswa putus sekolah di Jakarta. Mereka terdiri dari 78 siswa SMP, 32 siswa SMA, dan 163 siswa SMK.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono, melihat masih ada anak yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah, seperti anak berhadapan hukum. Mereka dikeluarkan tanpa pembinaan dan kesempatan untuk berbenah lebih baik.

"Sekolah mengambil langkah *drop out* hanya karena ingin menjaga nama baik, serta menganggap membina anak berperilaku menyimpang adalah beban," ujarnya.

Hal itu bertolak belakang dengan regulasi terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Sebab, anak tidak boleh dikeluarkan, tetapi harus melalui proses edukasi untuk berbenah lebih baik.

Ia juga menjumpai ada anak yang tak terpenuhi hak pendidikannya karena kebijakan sekolah, seperti tunggakan iuran. Hal ini menghambat anak mendapat laporan hasil belajar atau surat tanda kelulusan untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya.

"Anggaran pendidikan besar. Jumlah jangkauan program Indonesia Pintar makin meningkat. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan tak ada lagi anak dikeluarkan dari sekolah dalam situasi apa pun, serta mengurangi anak putus sekolah karena sebab apa pun," katanya. (DAN)